



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III PANGKALPINANG**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
PENYAKIT (P2P)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, nikmat dan hidayahNya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Organisasi dan tata kerja KKP telah ditetapkan dalam Permenkes RI No.2348/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan atas Permenkes RI No. 356/Menkes/Per/IV/2008, dimana KKP mempunyai tujuan dalam melakukan cegah tangkal penyakit yang memiliki peran penting sebagai unit pelaksana teknis program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu masuk Negara. Guna mewujudkan peran dan fungsi serta peningkatan kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang maka dipandang perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dan lanjutan dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun anggaran 2020-2024 yang sebelumnya telah dilaksanakan revisi untuk memuat informasi dan perencanaan yang lebih baik.

RKT 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang kurun waktu satu tahun kedepan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang tahun 2021 ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Semoga RKT KKP Kelas III Pangkalpinang tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Desember 2020  
Plh. Kepala Kantor Kesehatan  
Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang,



**dr. Bangun Cahyo Utomo**  
NIP. 198008252008121001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar setiap individu masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang paripurna yang meliputi fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu maka pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, kemandirian, secara adil dan merata melalui pendekatan *life cycle*.

Pembangunan Kesehatan Periode tahun 2020-2024 yaitu program Indonesia Sehat dengan Sasaran meningkatkan derajat Kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pembangunan kesehatan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat yang dilaksanakan melalui 3 pilar utama yaitu, paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional; 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Untuk pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) sendiri yaitu, kesehatan dengan Sub Fungsi yaitu kegiatan surveians, imunisasi, karantina Kesehatan, dan kesehatan matra, sedangkan outcome yaitu, Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Serta Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien tidak lepas dari peranan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di berbagai level administrasi termasuk pada level Satuan Kerja, yang didalamnya termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), salah satunya yaitu KKP Kelas III Pangkajene. Untuk pelaksanaan kegiatan secara maksimal di KKP Kelas III Pangkajene secara berkelanjutan maka dibutuhkan perencanaan yang tepat sasaran yang berguna dalam alokasi dana baik kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis maupun administrasi berupa dukungan manajemen.

## B. KONDISI UMUM

Pelabuhan dan Bandara merupakan *point of entry* (pintumasuk) negara yang berpotensi besar untuk masuk dan keluarnya penyakit dari dan atau ke negara/daerah lain, sehingga mempunyai faktor risiko terjadinya penularan penyakit antar negara/daerah. Dewasa ini masyarakat dunia tengah mengalami perkembangan dan perubahan cepat yang memberikan berbagai akibat pada umat manusia, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perubahan dan perkembangan di dunia serta pengaruh dari berbagai faktor kerusakan lingkungan tersebut akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di bidang penyakit menular. Permasalahan tersebut antara lain munculnya penyakit menular tertentu atau Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Flu Burung, Pes, Ebola, MERS, Meningitis Meningokokus dan penyakit infeksi emerging baru. Pada saat ini MERS-CoV, Flu Burung, Zika dan *Yellow fever* masih berjangkit. Disamping itu bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya "overcrowding" mempercepat penularan penyakit dari orang ke orang. Faktor pertumbuhan dan mobilitas penduduk ini juga mempengaruhi perubahan gambaran epidemiologis serta virulensi dari penyakit menular tertentu.

*International Health Regulation* tahun 2005 menuntut setiap Negara mampu mencegah, melindungi dan menanggulangi penyebaran PHEIC antar Negara tanpa memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu. Dengan semakin cepatnya perkembangan penyakit baik *New Emerging disease* dan *Emerging Infection Disease*, maka pelabuhan sebagai pintumasuk dari dan keluar daerah/Negara merupakan tempat yang potensial dalam penyebaran/transmisi faktor risiko maupun penyakit itu sendiri.

Berdasarkan kegiatan surveilans di KKP Kelas III Pangkajene, diketahui bahwa rata-rata kedatangan dan keberangkatan kapal setiap bulannya masing-masing sebanyak 1.390 kapal yang meliputi 1.354 kapal (97,4%)

daridomestik dan 40 kapal (2,6%) dari luarnegeri. Rata-rata kedatangan dan keberangkatan crew/ABK kapalsebesar 2.945 orang, sedangkan rata-rata kedatangan penumpang kapalsebesar 2.201 orang dan keberangkatansebesar 1.894 orang. Rata-rata jumlahjama'ahumrohsebesar 412 orang/bulan.

Gambar kondisiumum yang adasaatini, dapat teridentifikasi dan dianalisis berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya IHR revisi 2005 dan terbitnya Permenkes RI Nomor : 356/MENKES/PER/IV/2008 Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan anggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen P2P dan Kemenkes mulai meningkat. Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI sehingga tidak menjadi urusan pemerintah daerah dan tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kemenkes yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan semakin meningkatnya aktifitas di bandara dan pelabuhan. Hal ini menyebabkan meningkatnya peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologi masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas III Pangkalpinang sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan yang telah disusun sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan pelabuhan di lingkungan Kerja Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran ini dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, maka rencana yang telah disusun diharapkan dapat terlaksana sesuai rancangan sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang TA. 2021.

### **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kinerja tahunan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/MENKES/PER/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi dan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. 06/2014 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- k. Peraturan Menteri Keuangan No 142/PMK.02/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.
- l. Peraturan Menteri Keuangan No 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2021.
- m. Kepmenkesb No. : 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP.
- n. KepmenkesNo. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan KKKMMD.
- o. Keputusan Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- p. Keputusan Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa.
- q. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
- r. *International Health Regulation (IHR)* Tahun 2005.

#### **D. MAKSUD Dan TUJUAN**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 KKP Kelas III Pangkalpinang dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019 serta acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja dalam menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan serta evaluasi di lingkungan KKP Kelas III Pangkalpinang.

Tujuan yang ingin di capai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 KKP Kelas III Pangkalpinang ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai kantor kesehatan pelabuhan yaitu cegah tangkal penyakit di Pintu masuk .

Secara lebih terperinci tujuan dari disusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2021 adalah untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatkan kesiapsiagaan dalam

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah di pintu masuk negara dengan melaksanakan beberapa indikator kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang, sebagai berikut :

1) Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi KLB dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada beberapa indikator kinerja kegiatan:

- a. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar karantina kesehatan
- b. Persentase respons yang kewaspada dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP
- c. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
- d. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus
- e. Jumlah Pelabuhan/Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
- f. Jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
- g. Jumlah pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat- syarat sanitasi

2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik adalah Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada indikator pencapaian kegiatannya yaitu Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang, melalui indikator kinerja kegiatan : Jumlah pelabuhan/bandara bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.

3) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2P ML) adalah Menurunnya penyakit menular langsung. Untuk mencapai sasaran tersebut KKP Kelas III Pangkalpinang menguraikan pada indikator pencapaian kegiatannya yaitu menurun yang kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung, melalui indikator kinerja kegiatan : Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung di wilayah pelabuhan dan bandara



- 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
 Sasaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, melalui indikator kinerja kegiatan :
- Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
  - Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
  - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Rencana kinerja KKP Kelas III Pangkalpinang tahun anggaran 2021 disesuaikan dengan Rincian Kerta Kerja Satker yang telah disusun sebelumnya dan tertuang dalam DIPA Satker. Penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan dari kedua dukungan layanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Tahun Anggaran 2021**

INDIKATOR	DO	
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	<b>Jumlah Capaian Indikator</b>
		Pemeriksaan/ Penapisan orang
		Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina
		Pemeriksaan Barang Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	<b>Jumlah Capaian Indikator</b>
		Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang
		Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut
		Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan {TTU, T

IndeksPengendalianFaktorrisiko di pintumasuknegara	didapatpenghitungan rata-rata beberapacapaian yang berdasarkanpintumasuk (point of entry)	<b>JumlahCapaianIndikator</b>
		Kelengkapan data surveilans
		Jumlahsinyal SKD KLB dan Bencana yang diresponkurang
		Penyusunanrencankontigensi
		Indekspinjal ≤ 1
		HI perimeter = 0
		Tidakditemukan larva anopheles
		kepadatankecoarendah
		kepadatanlalat < 2
		TTU memenuhisyarat
TPM laik hygiene		
Kualitas air bersihmemenuhisyaratkesehatan		
Nilai kinerjaanggaran	E Monev DJA	<b>JumlahCapaianIndikator</b>
		Score E Monev DJA
Persentaseingkatkepatuhanpenyampaianlaporankeuangan	OM SPAN	<b>JumlahCapaianIndikator</b>
		Jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai dibagi dengan jumlah parameter yang di kalikan dengan 100%
Kinerja implementasi WBK satker	Dinilai dari self Assesment	<b>JumlahCapaianIndikator</b>
		Nilai self Assesment
PersentasePeningkatankapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkeningkatankapasitasebanyak 20 JPL dalamkurunwaktu 1 (satu) tahun	<b>JumlahCapaianIndikator</b>
		Jumlah ASN yang mendapatkeningkatankapasitasesetelah dalamkurunwaktu 1 (satu) tahun dibagi jumlah pegawai di k...

### BAB III

## **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 KKP Kelas III Pangkalpinang ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan baik dilakukan secara bulanan/triwulanan atau semester bahkan tahunan untuk tahun anggaran 2021. Dengan tersusunnya RKT ini diharapkan akan ada pengukuran yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat terlaksana dengan dengan semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan bersama diharapkan kerja sama semua pihak dalam lingkungan kerja KKP Kelas III Pangkalpinang.